LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

## BAB I
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

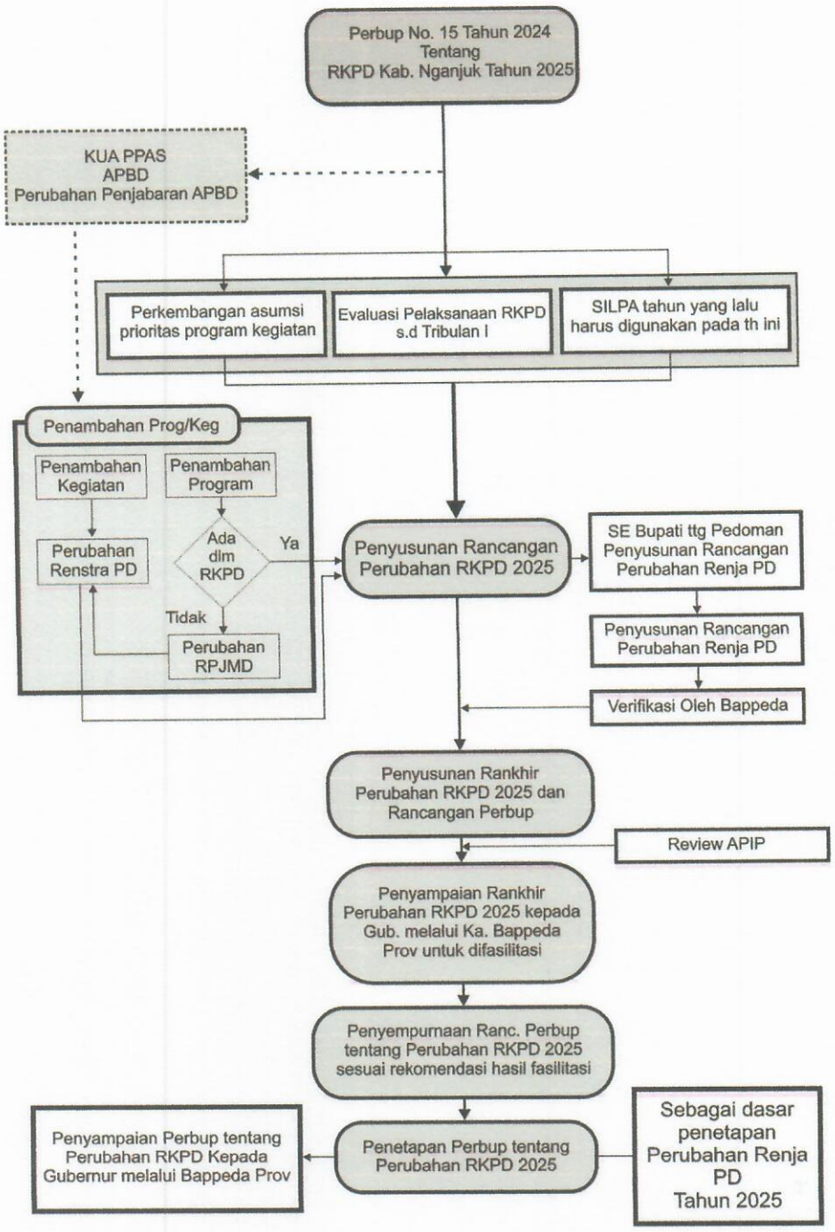
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.




Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 07)
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026; (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 09)
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerinttah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 16Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaankebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun berkenaan;

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

| Kode rekening | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2025) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah** | **80 Nilai** | | 78 Nilai | 73,35 Nilai | 94% | 80 Nilai | 0 Nilai | 0 % |
| | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun** | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 % |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | **Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 % |



7

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **1** | **1** | **2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3 Kegiatan** | | **3 Kegiatan** | **3 Kegiatan** | | **3 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **33%** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/ Bulan | | 25 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 68% | 25 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 68% |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 0 laporan | 0% |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | | 18 laporan | 18 laporan | 100% | 18 laporan | 2 laporan | 11% |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 Kegiatan** | | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **100 %** | **1 Kegiatan** | **0 Kegiatan** | **0 %** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0% | 0 Paket | 0 Paket | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.05.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan | 25 Orang | | 25 Orang | 17Orang | 68% | 25 Orang | 17Orang | 68% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fungsi | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **6 Kegiatan** | | **6 Kegiatan** | **6 Kegiatan** | **99%** | **6 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **16%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | 4Paket | 0 Paket | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 paket | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | 4Paket | 1 Paket | 25% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | 4Paket | 0 Paket | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0 % |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 23 Dokumen | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 100% | 23 Dokumen | 0 Dokumen | 0 % |
| 7 | 01 | 01 | 2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 % |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah** | **55 unit** | | **50 unit** | **50 unit** | **100%** | **55 Unit** | **0Unit** | **0%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Daerah** | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | |
| 7.01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 45 Unit | 45 Unit | 100% | 50 Unit | 0 Unit | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 uNit | | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 5 Unit | 0 Unit | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3Laporan** | | **3Laporan** | **3 Laporan** | **98%** | **3 Laporan** | **2 Laporan** | **66%** |
| 7.01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 0 laporan | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 2 laporan | 16% |
| 7.01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 2 laporan | 16% |
| 7.01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **47 Unit** | | **47 Unit** | **47 Unit** | **100%** | **47 Unit** | **0 Unit** | **0%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | | 8 unit | 8 unit | 99% | 3 unit | 0 unit | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.09 | 05 | Peneliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 18 Unit | | 18 Unit | 18 Unit | 100% | 18 Unit | 0 unit | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 100% | 20 Unit | 0 Unit | 0% |
| 7.01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 0 Unit | 0% |
| 7 | 01 | 02 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **0%** | **0%** |
| 7 | 01 | **2** | **2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **1 laporan** | | **1 laporan** | **1 laporan** | **100%** | **1 laporan** | **0 laporan** | **0%** |
| 7 | 01 | 2 | 2.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan | 6 laporan | | 6 laporan | 6 laporan | 100% | 6 laporan | 0 laporan | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | |
| 701 | **2** | **2.03** | | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **1 Dokumen** | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100%** | **1 Dokumen** | **0 Dokumen** | **0%** |
| **701** | 2 | 2.03 | | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| 7.002 1 | 2.04 | | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Terlaksanya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **1 laporan** | | **1 laporan** | **1 laporan** | **100%** | **1 laporan** | **0 laporan** | **0%** |
| 7.002 1 | 2.04 | 03 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 laporan | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 0 laporan | 0% |
| 701 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **50%** | **45%** |
| **701** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa** | **Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan** | **21 Lembaga Maysrakat** | | **21 Lembaga Maysrakat** | **21 Lembaga Maysrakat** | **100%** | **21 Lembaga Maysrakat** | **21 Lembaga Maysrakat** | **100%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Desa** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19 Lembaga Maysrakat | | 19 Lembaga Maysrakat | 19 Lembaga Maysrakat | 100% | 19 Lembaga Maysrakat | 19 Lembaga Maysrakat | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2.01.02 | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| 7 | 01 | 04 | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **0%** | **0%** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **1 laporan** | | **1 laporan** | **1 laporan** | **100%** | **1 laporan** | **0 laporan** | **0%** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01.01 | Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | | 4 laporan | 3 laporan | 75% | 4 laporan | 0 laporan | 0% |
| 7.01 | | 05 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **PERSENTASE KEGIATAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **0%** | **0%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | 19 Lembaga Maysrakat | | 19 Lembaga Maysrakat | 19 Lembaga Maysrakat | 100% | 19 Lembaga Maysrakat | 0 Lembaga Maysrakat | 0% |
| 7 | 01 | 05 | 2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 100% | 200 Orang | 0 Orang | 0% |
| 7 | | 01 | 06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **0%** | **0%** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | 21 Desa / Kelurahan | | 21 Desa / Kelurahan | 21 Desa / Kelurahan | 100% | 21 Desa / Kelurahan | 0 Desa / Kelurahan | 0% |
| 7 | 01 | 06 | 2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata | 21 Dokumen | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 100% | 21 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 19 Dokumen | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 100% | 19 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| 7 | 01 | 03 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan** | **95 %** | | **95 %** | **95 %** | **100%** | **95 %** | **50%** | **45%** |
| 7.01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Guyangan | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| 7.01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Guyangan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Unit | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 100% | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 100% |
| 7.01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedondong | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| 7.01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedondong | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | | 4 Pokmas/ Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 100% | 4 Pokmas/ Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 100% |

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | **≥ 91%** | Sangat Tinggi |
| 2. | **76% ≤ 90%** | Tinggi |
| 3. | **66% ≤ 75%** | Sedang |
| 4. | **51% ≤ 65%** | Rendah |
| 5. | **≤ 50%** | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. (Fungsional)
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran.

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0 % | Sangat Rendah |

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 45 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 0 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Efisiensi Anggaran, yang mengakibatkan perubahan anggaran pada sipd-ri, menunggu petunjuk lebih lanjut dari bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Mengoptimalkan pencairan dana rutin kecamatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN | 45 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Adanya Peraturan Baru PMK 212 yang mengatur tentang Anggaran bagi Kelurahan | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Melakukan koordinasi secara rutin dengan Bagian Anggaran BPKAD |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sertaIndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM atau NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | Realisasi Capaian Tahun | | | Rasio Capaian pada Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat | | | | 900 | 1200 | | 828 | 1164 surat | | 92 % | 97 % | |
| 2 | Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan | | | | 12 | 12 | | 12 | 12 | | 100% | 100% | |
| 3. | Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan | | | | 21 | 21 | | 21 | 21 | | 100% | 100% | |
| 5. | Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 100% | 100% | |
| 6. | Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir | | | | 115 | 115 | | 104 | 102 | | 91 % | 89 % | |
| 7. | Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan ( KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk) | | | | 1500 | 1620 | | 1380 | 1458 | | 92 % | 90 % | |

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bagor menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Bagor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bagor terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

adalah "Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan".

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah "Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

| No. | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode Renstra | Target Kinerja | | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 72.56 | 78 | 80 | 82 | 82 |

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Bagor adalah :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
3. Tingkat kehadiran ASN
4. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
5. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
7. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bagor

| No. | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode Renstra | Target Kinerja | | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 2. | Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan | 85 | 88 | 90 | 92 | 92 |

2.2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah "Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

| No. | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode Renstra | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2025 | 2025 |
| 1. | Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 72.56 | 78 | - |

2.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat Daetrah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan –tujuan OPD.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bagor

| No. | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode Renstra | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2025 | 2025 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 86 | 89 | - |
| 2. | Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan | 85 | 90 | - |

2.3. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bagor telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Bagor, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

5). *Peningkatan* Tata *Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagordapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapai dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | • Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | • Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang | • Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik<br>• Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik |
| | | • Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib | • Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif<br>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan<br>• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa |
| | | • Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal. | • Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa |

Sumber : Renstra 2024-2026

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahanyang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

| No. | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| NIHIL | | | | | |
| | | | | | |

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

# BAB III
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan visi nasional agar mempedomani Asta Cita sebagai misi Presiden telah ditetapkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan HAM.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam neger
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial Pertanian, Dan Pengembangan Perdagangan Industri Yang Diprioritaskan Berbahan Baku Hasil Pertanian
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, dan Pariwisata).
3. Pemantapan SDM Berdayasaing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter.
4. Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian
6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik
7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan Sebagai Pendukung Investasi Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)", "Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamata" dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(8)* |
| 1. | Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan | - | Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Nilai | 80 |
| | | Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Nilai | 89 |
| | | Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan | Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan | % | 40 |

Sumber : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Perubahan Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Tabel 3.2 Asumsi perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Perangkat Daerah yang mendkung tema dan prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan daeah tahun 2025.

**RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN BAGOR**

| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif (Sebelum) | Pagu Indikatif (sesudah) | Keterangan | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian (Output) | Target | | | Bertambah | berkurang | |
| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Uraian (Output) | Pagu Indikatif/Target | | | | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **NILAI SAKIP KECAMATAN** | **80 Nilai** | **4.673.658.501** | **5.160.238.333** | **-** | **-24.040.197** | Adanya Instruksi Bupati tentang Efisiensi Anggaran |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun** | **4 Laporan** | **8.668.000** | **5.947.000** | **-** | **2.721.000** | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 8.668.000 | 5.947.000 | - | 2.721.000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3 Dokumen** | **3.273.418.250** | **3.850.702.250** | - | **589.148.319** | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang | 3.215.103.260 | 3.818.025.000 | - | 608.840.069 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.918.000 | 2.038.000 | - | 880.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | 8.867.000 | 6.256.250 | - | 2.610.750 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **90.339.136** | **15.648.400** | - | **-72.940.738** | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 22.690.736 | 3.500.000 | | -17.440.736 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 67.648.400 | 12.148.400 | - | 55.500.000 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **6 Dokumen** | **238.433.710** | **205.153.540** | **-** | **-33.204.360** | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.501.600 | 5.501.600 | - | - | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 89.082.860 | 80.503.740 | - | -9.275.900 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11.882.650 | 8.911.700 | - | 2.970.950 | |
| Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.400.000 | 2.400.000 | - | - | |
| Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 43.595.000 | 29.843.000 | - | -13.572.000 | |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan Jumlah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemerintah Daerah** | **50 Unit** | **459.863.643** | **494.863.643** | **127.357.515** | - | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 50 Unit | 107.553.450 | 115.101.450 | 7.548.000 | - | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 211.974.480 | 238.059.480 | 103.930.188 | - | |
| | | | 66.711.000 | 75.591.000 | 8.880.000 | | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Laporan** | **378.122.000** | **378.122.000** | - | - | |
| Penyediaan Jasa SUrat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 51.028.000 | 51.028.000 | - | - | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 151.368.000 | 151.368.000 | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara** | **47 Unit** | **224.778.750** | **209.801.500** | - | **-12.635.100** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 63.746.500 | 48.769.250 | - | -14.977.250 | |
| Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 18 Unit | 14.750.000 | 14.750.000 | - | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 24.960.000 | 24.960.000 | - | | |
| Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara /Direhabilitasi | 1 Unit | 71.170.500 | 71.170.500 | - | - | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB** | **95 %** | **135.475.000** | **89.650.000** | - | **-49.987.500** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan koordinasi dengan perangkat vertikal jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan** | **1 Laporan** | **52.375.000** | **25.300.000** | - | **-27.075.000** | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan | 52.375.000 | 25.300.000 | - | -27.075.000 | |
| **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **1 Dokumen** | **19.800.000** | **20.250.000** | - | **450.000** | |
| Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4 Dokumen | 19.800.000 | 20.250.000 | - | 450.000 | |
| **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** | **1 Laporan** | **63.300.000** | **44.100.000** | - | **19.200.000** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 63.300.000 | 44.100.000 | | 19.200.000 | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | **95%** | **118.925.000** | **73.675.000** | | **-45.250.000** | |
| **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan** | 21 Lembaga Kemasyarakat | **118.925.000** | **75.150.000** | | **43.775.000** | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19 Lembaga Kemasyarakat | 19.675.000 | 12.075.000 | | **-7.600.000** | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 6 Dokumen | 99.250.000 | 61.600.000 | | **-37.650.000** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS** | **95%** | **65.225.000** | **61.600.000** | | **-37.650.000** | |
| **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **4 Laporan** | **65.225.000** | **47.450.000** | | **27.672.000** | |
| Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 65.225.000 | 47.450.000 | | 27.672.000 | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN** | **100 Orang** | **147.744.000** | **144.994.000** | | **2.750.000** | |
| **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** | **100 Orang** | **147.744.000** | **144.994.000** | | **2.750.000** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang | 147.744.000 | 144.994.000 | | 2.750.000 | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG** | **95 %** | **87.070.000** | **61.715.500** | | **25.354.500** | |
| **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang** | **21 Desa/Kelurahan** | **87.070.000** | **61.715.500** | | **25.354.500** | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 21 Dokumen | 49.770.000 | 35.665.500 | | -5.104.500 | |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 19 Dokumen | 37.300.000 | 26.050.000 | | -11.250.000 | |

## RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KELURAHAN GUYANGAN

| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif (Sebelum) | Pagu Indikatif (sesudah) | Keterangan | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian (Output) | Target | | | Bertambah | berkurang | |
| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Uraian (Output) | Pagu Indikatif/Target | | | | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **NILAI SAKIP KECAMATAN** | **80 Nilai** | **224.116.266** | **209.013.418** | - | **15.102.848** | Adanya Instruksi Bupati tentang Efisiensi Anggaran |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **23.265.000** | **12.190.000** | - | **11.165.000** | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | **1 Dokumen** | 23.265.000 | 12.190.000 | - | 11.165.000 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **4 Dokumen** | **42.480.900** | **38.453.050** | - | **4.027.800** | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.093.500 | 1.093.500 | - | - | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 32.879.900 | 31.278.750 | - | 1.601.150 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.507.500 | 3.080.800 | - | 2.427.500 | |
| Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 Laporan** | **38.683.168** | **38.683.168** | - | - | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan | 5 Unit | 38.683.168 | 38.683.168 | - | - | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2 Dokumen** | **92.548.000** | **92.548.000** | - | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 16.000.000 | 16.000.000 | - | - | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 76.548.000 | 76.548.000 | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara** | **13 Unit** | **27.139.200** | **27.139.200** | - | - | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 8.539.200 | 8.539.200 | - | - | |
| Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4 Unit | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara | 6 Unit | 2.100.000 | 2.100.000 | - | - | |
| Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | **95%** | **349.654.551** | **349.654.551** | - | - | |
| **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan** | **2 Kegiatan** | **349.654.551** | **349.654.551** | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana | 100% | 321.536.151 | 321.536.151 | - | - | |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Terlaksannya Pemberdayaan Masryarakat | 100% | 28.118.400 | 28.118.400 | - | - | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG** | **95 %** | **139.676.762** | **130.546.762** | - | **9.130.000** | |
| **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang** | **Kelurahan** | **139.676.762** | **130.546.762** | - | **9.130.000** | |
| Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 139.676.762 | 130.546.762 | - | 9.130.000 | |

## RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KELURAHAN KEDONDONG

| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif (Sebelum) | Pagu Indikatif (sesudah) | Keterangan | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian (Output) | Target | | | Bertambah | berkurang | |
| Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Uraian (Output) | Pagu Indikatif/ Target | | | | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **NILAI SAKIP KECAMATAN** | **80 Nilai** | **196.374.795** | **181.349.545** | - | **15.025.250** | Adanya Instruksi Bupati tentang Efisiensi Anggaran |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **23.265.000** | **12.190.000** | - | **11.075.000** | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Ppengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 23.265.000 | 12.190.000 | - | 11.075.000 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **4 Dokumen** | **42.490.700** | **38.540.450** | - | **3.950.300** | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.093.500 | 1.093.500 | - | - | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 32.889.700 | 31.366.150 | - | 1.523.550 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.507.500 | 3.080.000 | - | 2.427.500 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1 Laporan** | **27.428.545** | **27.428.545** | - | - | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan | 5 Unit | 27.428.545 | 27.428.545 | - | - | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2 Dokumen** | **80.178.000** | **80.178.000** | - | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 3.630.000 | 3.630.000 | - | - | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 76.548.000 | 76.548.000 | - | - | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara** | **13 Unit** | **23.012.550** | **23.012.550** | - | - | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 6.212.550 | 6.212.550 | - | - | |
| Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4 Unit | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara | 6 Unit | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | |
| Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitas | 1 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | i | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | **95%** | **359.990.790** | **359.990.790** | - | - | |
| **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan** | **2 Kegiatan** | **359.990.790** | **359.990.790** | - | - | |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Telaksannya pembangunan sarana dan prasarana | 100% | 331.785.290 | 331.785.290 | - | - | |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Terlaksannya Pemberdayaan Masryarakat | 100% | 28.205.500 | 28.205.500 | - | - | |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG** | **95 %** | **156.702.753** | **147.572.753** | | **9.130.000** | |
| **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang** | **Kelurahan** | **156.702.753** | **147.572.753** | | **9.130.000** | |
| Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 156.702.753 | 147.572.753 | | 9.130.000 | |

# PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
## KECAMATAN BAGOR KAB. NGANJUK
## TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | KECAMATAN BAGOR | | | | | | | 6.089.390.153,00 | 6.234.122.357,00 | 6.565.487.689,00 | 476.097.536,00 | | | | | | | 6.622.121.150,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 6.089.390.153,00 | 6.234.122.357,00 | 6.565.487.689,00 | 476.097.536,00 | | | | | | | 6.622.121.150,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | 6.089.390.153,00 | 6.234.122.357,00 | 6.565.487.689,00 | 476.097.536,00 | | | | | | | 6.622.121.150,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Kecamatan | | | | 80 Nilai | 80 Nilai | 4.566.233.807,00 | 4.673.658.501,00 | 5.160.238.333,00 | -24.046.197,00 | | | | | | | 4.541.193.500,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.668.000,00 | 8.668.000,00 | 5.947.000,00 | -2.721.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 3.384.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 8.668.000,00 | 8.668.000,00 | 5.947.000,00 | -2.721.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.384.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.261.553.931,00 | 3.273.416.260,00 | 3.850.702.260,00 | 589.148.319,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 3.642.000.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 3.209.197.931,00 | 3.215.103.260,00 | 3.818.026.000,00 | 608.540.069,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.590.751.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.918.000,00 | 2.918.000,00 | 2.038.000,00 | -880.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.384.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.918.000,00 | 8.667.000,00 | 6.256.250,00 | 3.338.250,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 88.589.138,00 | 90.339.138,00 | 16.648.400,00 | -72.940.738,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kec. Bagor | | 27.540.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.940.738,00 | 22.690.738,00 | 3.500.000,00 | -17.440.738,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 25 Orang | 25 Orang | 67.648.400,00 | 67.648.400,00 | 12.148.400,00 | -55.500.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 12.540.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 238.357.900,00 | 238.433.710,00 | 205.153.540,00 | -33.204.360,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 219.199.550,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.111.600,00 | 5.501.600,00 | 5.501.600,00 | 390.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 89.779.700,00 | 89.062.880,00 | 80.503.740,00 | -9.275.960,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 67.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.500.000,00 | 11.682.680,00 | 8.911.700,00 | -2.588.300,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 9.600.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 43.695.000,00 | 43.595.000,00 | 29.843.000,00 | -13.752.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 49.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 367.506.128,00 | 459.896.643,00 | 494.883.643,00 | 127.357.515,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kec. Bagor | | 171.144.521,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 107.553.450,00 | 115.101.450,00 | 115.101.450,00 | 7.548.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 134.129.292,00 | 211.974.480,00 | 238.059.480,00 | 103.930.188,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 66.711.000,00 | 66.711.000,00 | 75.591.000,00 | 8.880.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan. | Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pl6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 311.702.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 51.028.000,00 | 51.028.000,00 | 51.028.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 42.200.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 151.366.000,00 | 151.366.000,00 | 151.366.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 129.816.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Tertaksenrinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 47 Unit | 47 Unit | 222.436.600,00 | 224.776.750,00 | 209.901.500,00 | -12.635.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 166.222.429,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 63.746.500,00 | 63.746.500,00 | 48.769.250,00 | -14.977.250,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 84.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 14.750.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 24.960.000,00 | 24.960.000,00 | 24.960.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 71.170.500,00 | 71.170.500,00 | 71.170.500,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 20.400.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| **2.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib** | | | | **95 %** | **95 %** | **135.475.000,00** | **135.475.000,00** | **88.650.000,00** | **-46.987.500,00** | | | | | | | **85.487.500,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 52.375.000,00 | 52.375.000,00 | 25.300.000,00 | -27.075.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 45.487.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 6 Laporan | 12 Laporan | 52.375.000,00 | 52.375.000,00 | 25.300.000,00 | -27.075.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 45.487.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 20.250.000,00 | 650.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 20.250.000,00 | 450.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.300.000,00 | 63.300.000,00 | 44.100.000,00 | -19.200.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.300.000,00 | 63.300.000,00 | 44.100.000,00 | -19.200.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROBES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | | | | **95 %** | **95 %** | **828.570.341,00** | **828.570.341,00** | **783.320.341,00** | **-42.254.159,00** | | | | | | | **870.824.500,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 118.925.000,00 | 118.925.000,00 | 73.675.000,00 | -45.250.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 170.824.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perancanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Dasa* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 19.675.000,00 | 19.675.000,00 | 12.075.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 26.841.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksikan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksikan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 99.250.000,00 | 99.250.000,00 | 61.800.000,00 | -37.650.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 143.993.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas** | | | | **95 %** | **95 %** | **62.725.000,00** | **65.225.000,00** | **47.450.000,00** | **27.672.000,00** | | | | | | | **90.397.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 62.725.000,00 | 65.225.000,00 | 47.450.000,00 | -15.275.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 90.397.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinegitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 62.725.000,00 | 65.225.000,00 | 47.450.000,00 | -15.275.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 90.397.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 5 | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **133.583.000,00** | **147.744.000,00** | **144.994.000,00** | **-24.861.750,00** | | | | | | | **108.701.250,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 133.583.000,00 | 147.744.000,00 | 144.994.000,00 | 11.411.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 108.701.250,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 21 Orang | 21 Orang | 133.563.000,00 | 147.744.000,00 | 144.994.000,00 | 11.411.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 108.701.250,00 | |
| 6 | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase dana cepat berkembang** | | | | **95 %** | **95 %** | **363.803.115,00** | **383.449.515,00** | **339.835.015,00** | **-38.285.715,00** | | | | | | | **325.517.400,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang* | | | | 21 Desa/Ke lurahan | 21 Desa/Ke lurahan | 363.803.115,00 | 383.449.515,00 | 339.835.015,00 | -23.968.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 325.517.400,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 40.770.000,00 | 49.770.000,00 | 35.665.500,00 | -5.104.500,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif* | | | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 37.300.000,00 | 37.300.000,00 | 26.050.000,00 | -11.250.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Semua KelDesa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 22.984.900,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | | **KELURAHAN KEDONDONG** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.922.121.159,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.922.121.159,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.922.121.159,00** | |
| 1 | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Kecamatan** | | | | **80 Nilai** | **80 Nilai** | **4.565.233.097,00** | **4.673.658.501,00** | **5.160.238.333,00** | **-24.040.197,00** | | | | | | | **4.541.193.300,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.261.853.931,00 | 3.273.416.260,00 | 3.850.702.250,00 | 589.148.319,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 3.642.000.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.265.000,00 | 23.265.000,00 | 12.190.000,00 | -11.075.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 19.650.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 238.357.900,00 | 238.433.710,00 | 205.153.540,00 | -33.204.360,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 219.199.550,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 785.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.889.700,00 | 32.889.700,00 | 31.366.150,00 | -1.523.550,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 30.414.750,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.507.500,00 | 5.507.500,00 | 3.080.800,00 | -2.426.700,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 974.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 367.506.128,00 | 468.896.643,00 | 494.663.643,00 | 127.357.515,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 171.144.521,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 23.759.218,00 | 27.428.545,00 | 27.428.545,00 | 3.669.327,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.144.521,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 311.702.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.630.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.548.000,00 | 76.548.000,00 | 76.548.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 84.908.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 47 Unit | 47 Unit | 222.436.600,00 | 224.776.750,00 | 209.801.500,00 | -12.635.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 168.222.429,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 7.204.800,00 | 8.212.550,00 | 8.212.550,00 | 1.007.750,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 7.823.600,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 7.139.929,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 2 | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | | | | **95 %** | **95 %** | **828.570.341,00** | **828.570.341,00** | **783.320.341,00** | **-42.254.109,00** | | | | | | | **870.824.500,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan* | | | | 21 Lembaga Masyarakat | 21 Lembaga Masyarakat | 709.645.341,00 | 709.645.341,00 | 709.645.341,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 700.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 331.785.290,00 | 331.785.290,00 | 331.785.290,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Polmas / Ormas | 1 Polmas / Ormas | 28.205.500,00 | 28.205.500,00 | 28.205.500,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 3 | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Dana Cepat Berkembang** | | | | **95 %** | **95 %** | **363.803.115,00** | **363.449.515,00** | **339.835.015,00** | **-38.285.715,00** | | | | | | | **325.517.400,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang* | | | | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan | 363.803.115,00 | 363.449.515,00 | 339.835.015,00 | -23.968.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 325.517.400,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 151.379.553,00 | 156.702.753,00 | 147.572.753,00 | -3.806.800,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 107.630.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | | **KELURAHAN GUYANGAN** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.822.121.150,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.822.121.150,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **6.089.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.487.689,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.822.121.150,00** | |
| 1 | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Kecamatan** | | | | **80 Nilai** | **80 Nilai** | **4.585.233.897,00** | **4.673.658.001,00** | **5.160.238.333,00** | **-24.040.197,00** | | | | | | | **4.541.193.500,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.261.563.931,00 | 3.273.416.260,00 | 3.850.702.250,00 | 589.148.319,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | kab. Nganjuk | | 3.642.000.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.265.000,00 | 23.265.000,00 | 12.190.000,00 | -11.075.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 20.715.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 238.367.900,00 | 238.433.710,00 | 205.153.540,00 | -33.204.360,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 219.192.550,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.375.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.879.900,00 | 32.879.900,00 | 31.278.750,00 | -1.601.150,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 28.595.750,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.507.500,00 | 5.507.500,00 | 3.060.800,00 | -2.426.700,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 4.256.050,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 367.606.128,00 | 469.896.643,00 | 494.863.643,00 | 127.357.515,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 171.144.521,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 35.353.188,00 | 38.683.188,00 | 38.683.188,00 | 3.330.000,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 378.122.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 311.752.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 3.240.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.546.000,00 | 76.546.000,00 | 76.546.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 64.905.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara* | | | | 47 Unit | 47 Unit | 222.436.600,00 | 224.778.750,00 | 209.801.500,00 | -12.635.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 166.222.429,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.204.800,00 | 8.539.200,00 | 8.539.200,00 | 1.334.400,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 7.823.809,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.600.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 1.400.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 13.284.900,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR** | | | | **95 %** | **95 %** | **828.570.341,00** | **828.570.341,00** | **783.320.341,00** | **-42.254.159,00** | | | | | | | **870.824.500,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan* | | | | 21 Lembaga Masyarakat | 21 Lembaga Masyarakat | 709.645.341,00 | 709.645.341,00 | 709.645.341,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 700.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 321.536.151,00 | 321.536.151,00 | 321.536.151,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Poklmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Poklmas / Ormas | 1 Poklmas / Ormas | 28.118.400,00 | 28.118.400,00 | 28.118.400,00 | 0,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BAGOR |
| 3. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Cepat Berkembang** | | | | **95 %** | **95 %** | **363.803.115,00** | **383.449.515,00** | **339.835.015,00** | **-38.285.715,00** | | | | | | | **325.517.400,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang* | | | | 21 Desa/Kelurahan | 21 Desa/Kelurahan | 363.803.115,00 | 383.449.515,00 | 339.835.015,00 | -23.968.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | Kab. Nganjuk | | 325.517.400,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tuges, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 134.353.582,00 | 139.676.762,00 | 130.546.762,00 | -3.806.800,00 | Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik | | | 99.902.500,00 | KECAMATAN BAGOR |
| | | **JUMLAH** | | | | | | | **6.069.390.153,00** | **6.234.122.357,00** | **6.565.457.589,00** | **476.097.536,00** | | | | | | | **6.022.121.150,00** | |

Tabel 3.3 Pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2024

| NO | KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedondong | 114.625 |
| 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Guyangan | 120.000 |
| TOTAL | | 214.625 |

Pemanfaatan Silpa Tahun Anggaran 2024 dihibahkan ke Kecamatan Nganjuk.

Tabel 3.4 Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Kewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja PD:

| NO | KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| | | |
| | NIHIL | |
| | | |

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

# BAB IV
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Bagor sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Bagor Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

## 4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Bagor dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan Bagor yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Bagor Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Bagor, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bagor; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bagor dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Bagor.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Bagor dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001